

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TIMUR NOMOR 305 TAHUN 2005 TENTANG TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR**

TESIS



**OLEH :
RUDY SAPUTRA
NPM : 051801009**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
MEDAN
2007**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TIMUR NOMOR 305 TAHUN 2005 TENTANG TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH :
RUDY SAPUTRA
NPM : 051801009

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 305
Tahun 2005 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Timur

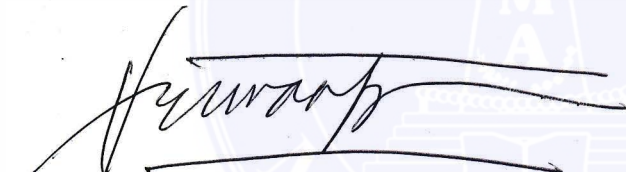
Nama : RUDY SAPUTRA

NIM : 051801009

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

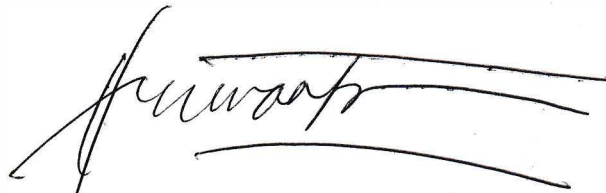

Drs. Heri Kusmanto, MA

Drs. Murbanto Sinaga, MA

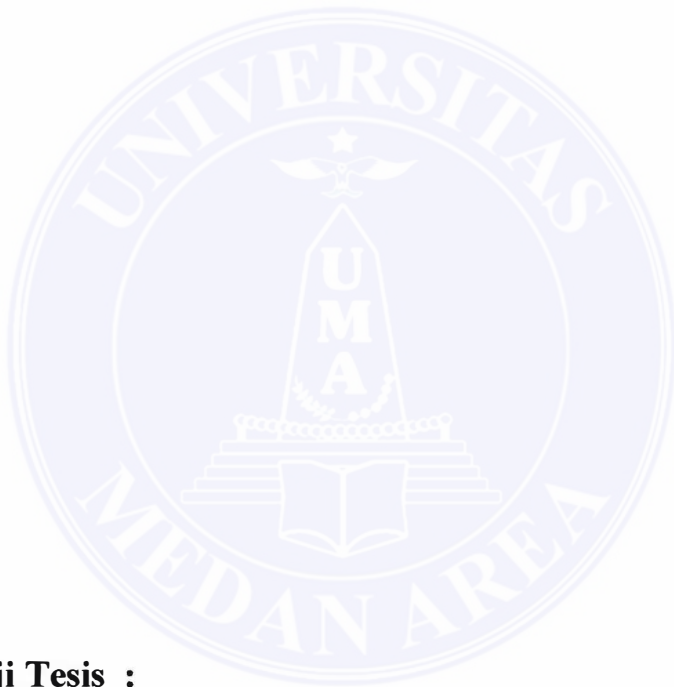
Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur


Drs. Kariono, MA


Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada Tanggal 14 Juni 2007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris	: Ir. Erwin Pane, MS
Pembimbing I	: Drs. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II	: Drs. Murbanto Sinaga, MA
Penguji Tamu	: Drs. Kariono, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Hidayah dan Karunia-Nya yang selalu menyertai penulis dari awal penulis menuntut ilmu pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area sampai dengan selesainya penulisan Tesis berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 305 Tahun 2005 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Berbagai perenungngan mengiringi penulisan tesis dimana lokasi penulisan yang merupakan tempat bertugas penulis, sehingga penulis dapat merasakan setiap denyut perubahan, sehingga dengan segala keterbatasan penulisan berusaha menuangkan permasalahan tanpa ikut larut secara sebyektif, sehingga obyektifitas penelitian dapat dijaga.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulis belajar di Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Murbanto Sinaga, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs. Kariono, MA sebagai Ketua Program Studi PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
5. Bapak Bupati Kabupaten Aceh Timur, atas izin belajar dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Para Seniorensi STPDN sekaligus seniorensi di kampus MAP, Bapak serta Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.

Terima kasih dan salam kasihku untuk kedua orangtuaku dan keluargaku, yang tidak pernah putus asa memberikan semangat, tenaga serta materi yang tak terhingga dan mengalirkan doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2007

Penulis

RUDY SAPUTRA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kebijakan Publik.....	9
2.2. <i>Implementasi kebijakan</i>	12
a. Organisasi	16
b. Interpretasi	16
c. Penerapan	17
2.3. Organisasi Sektor Publik	18
2.4. Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.....	20
BAB III : METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Lokasi Penelitian.....	30
3.3. Populasi.....	31
3.4. Rencana Sampling	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya.....	31

3.6. Operasionalisasi Variabel	32
3.7. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 35

4.1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur	35
4.2. Letak Geografis.....	40
4.3. Sumber Daya Alam	40
4.4. Demografi	43

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

5.1. Deskripsi Umum Hasil Penelitian	46
5.2. Gambaran Umum Responden	49
5.3. Implementasi Kebijakan tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Sekretariat Dacrah Kabupaten Aceh Timur	52
5.3.1. Organisasi.....	52
5.3.2. Interpretasi.....	60
5.3.3. Penerapan	66
5.4. Pembahasan.....	68

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 71

6.1. Kesimpulan	71
6.2. Saran dan Rekomendasi Kebijakan	71

DAFTAR PUSTAKA..... 74

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Birokrasi pemerintah tidak dapat lagi menampilkan sosok sebagai penguasa, tetapi lebih berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Semua bentuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Wacana tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata didalam mengelola pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini.

Dalam rangka mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka berbagai kebijakan strategis telah ditetapkan, diantaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, disamping itu, telah ditetapkan pula pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, seperti diatur dalam UU No.33 Tahun 2004. Berbagai peraturan pelaksanaan dari kedua UU tersebut sedang dipersiapkan, demikian pula serangkaian kebijakan strategis sedang terus diupayakan dalam melakukan penetapan dibidang kelembagaan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah.

Paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah telah digunakan dalam Undang-undang Nomor .32 Tahun 2004. Undang-undang ini meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah kabupaten berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Banyak hal baru yang tidak pernah dijumpai dalam

ketentuan-ketentuan sebelumnya. Pemerintahan yang dialogis, cerdas, dan profesional, merupakan dambaan semua pihak untuk masa yang akan datang. Pemerintahan seperti itu hanya akan terwujud jika kinerja dari setiap unit birokrasi pemerintah berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, hal itu berarti keharusan bagi aparatur pemerintah untuk berbenah diri dan mempersiapkan institusinya untuk merealisasi komitmennya terhadap rakyat yang mesti diperjuangkan nasibnya. Karena itu upaya mendata, mengidentifikasi permasalahan dan mendiskusikan kiranya perlu terus dikembangkan sampai ketinggian pilihan kebijakan yang memungkinkan terjadinya proses pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah secara sistematis dan komprehensif.

Untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, maka setiap pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dan membenahi berbagai kekurangan yang terjadi. Kabupaten Aceh Timur juga harus berbenah diri untuk mengantisipasi perkembangan ini, agar efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan akan semakin optimal. Otonomi yang memberikan keleluasaan dalam mengatur diri dan rumah tangga daerah juga membawa konsekuensi terhadap pembiayaan semua pengeluaran pembangunan, yakni berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk dapat mewujudkan otonomi ini maka sangat dibutuhkan kinerja pemerintah daerah yang berkualitas dan mampu berkarya secara maksimal.

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang salah satunya adalah sumber daya manusia (*human resources*), yang dapat ditinjau dari dua aspek yang saling berkaitan. Aspek kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N, 1994, *Analisis Kebijaksanaan Publik*, Disunting dan Diindonesiakan Oleh Muhajir Darwin, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward IR, 1980, *Implementation Public Policy*, Washinton DC ; Conggresional Quarter Press.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jones, Gareth R., 1995, *Organization Theory: Text And Cases*, AddisonWestey Publishing Company
- Mahsun, Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy I. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Resdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 305 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- Republik Indonesia, 2004,*Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : CV. Tamita Utama
- Sugyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung , Alfabeca
- Tangkilisan, Nogi S. Hessel, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Kerjasama Lukman Ofset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Wahab, Solihin Abdul, 1990,, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, malang; Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.